

KETIMPANGAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KOMPONENNYA ANTAR KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 2010-2020

(Inequality in Human Development Index and Its Components on Regencies/Municipalities In Kalimantan Selatan Province 2010-2020)

Abdurrahman¹, Faisal Fatchur Rachman²

^{1,2}Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan
Jl. Trikora No. 7 Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Indonesia

email: 1abukhwarizmi@gmail.com

ABSTRAK

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah salah satu indikator strategis pembangunan yang digunakan untuk melihat capaian pembangunan manusia di suatu daerah. Capaian IPM kabupaten/kota di Kalimantan Selatan cukup bervariasi. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan apakah memang terjadi kesenjangan IPM beserta komponen penyusunnya (umur harapan hidup saat lahir, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita di sesuaikan) antar kabupaten/kota di Kalimantan Selatan periode 2010-2020. Dengan menggunakan alat analisis deskriptif *boxplot* didapatkan kesimpulan kesenjangan masih terjadi pada IPM dan komponen penyusunnya. Banjarbaru dan Banjarmasin berposisi sebagai *outlier* maupun ekstrem atas. Sedangkan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Barito Kuala berposisi sebagai *outlier* bawah. Kondisi ini harus mendapatkan perhatian bagi pemangku kebijakan. Pembangunan manusia di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Barito Kuala harus dipacu agar dapat mengejar ketertinggalan dengan daerah lain.

Kata Kunci: IPM, ketimpangan, *boxplot*

ABSTRACT

Human Development Index (HDI) is one of the strategic development indicators to see the achievements of human development in a region. HDI achievements of regencies/municipalities in Kalimantan Selatan Province are very varied. This study aims to prove whether the HDI of regencies/municipalities in Kalimantan Selatan Province and its components (life expectancy at birth, expected years of schooling, mean of years schooling, and adjusted per capita expenditure) 2010-2020 occurred are unequal. By using the descriptive boxplot analysis tool, it can be concluded that gaps still occur in HDI and its components. Banjarbaru and Banjarmasin are both outliers in the upper extremes. Meanwhile, Hulu Sungai Utara and Barito Kuala Regency are positioned as lower outliers. This condition must get the attention of policymakers. Human development in Hulu Sungai Utara and Barito Kuala Districts must be encouraged to catch up with other areas.

Keyword: HDI, inequality, *boxplot*

PENDAHULUAN

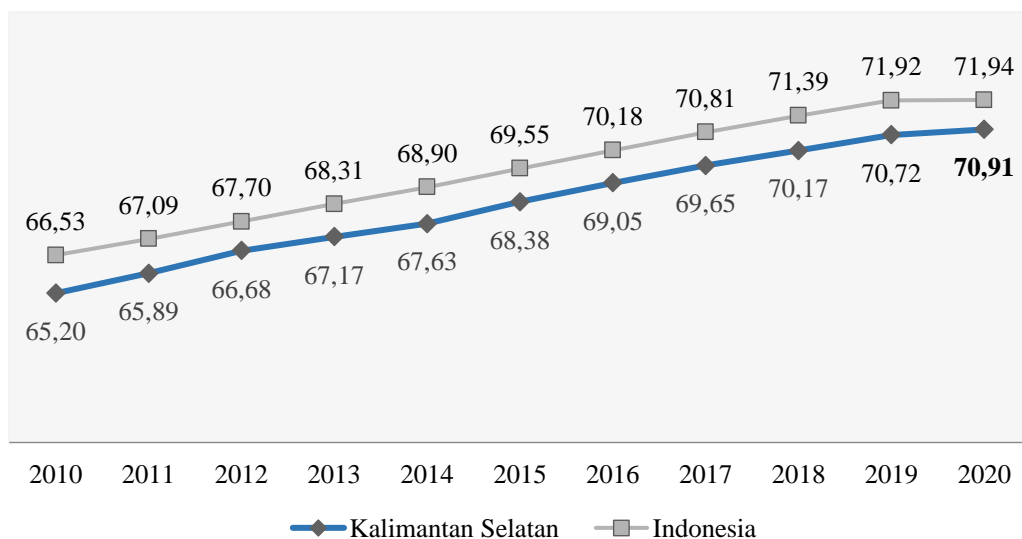
Manusia adalah kekayaan yang sesungguhnya bagi sebuah negara. Demikian kalimat pembuka pada Laporan Pembangunan Manusia yang diterbitkan oleh UNDP (1990). Tujuan dari pembangunan pada hakikatnya adalah menciptakan lingkungan yang memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk menikmati hidup yang kreatif, sehat, serta berumur panjang. Hal ini terlihat sederhana, namun sering kali terlupakan karena berfokus mengumpulkan kekayaan finansial semata (UNDP, 1990).

Manusia atau penduduk yang hidup dengan kreatif, sehat, serta berumur panjang adalah mereka yang berkualitas. Dengan kualitas yang melekat pada penduduk diharapkan akan dapat menggerakkan roda pembangunan. Penduduk yang berkualitas diberi bekal dengan nutrisi dan gizi yang mencukupi sejak dalam kandungan hingga dewasa. Penduduk yang berkualitas juga diberi bekal dengan pendidikan dan keahlian. Ini menjadi dasar dalam konsep pembangunan manusia dan sekaligus menjadi pelengkap terhadap konsep pembangunan konvensional yang terbatas pada topik tentang pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan manusia dapat diartikan sebagai proses memperluas pilihan. Perluasan pilihan yang dimaksud adalah dalam kerangka peningkatan kapabilitas, seperti peningkatan kualitas kesehatan, pengetahuan dan keahlian, peningkatan akses terhadap sumber-sumber kebutuhan agar hidup secara layak. Pembangunan manusia juga berarti perubahan positif pada manusia seutuhnya, fokus pada masyarakat dan kesejahteraannya, dan menjadi tujuan akhir dari segala macam pembangunan (UNDP, 1990; BPS, 2020).

Sebelumnya Amartya Sen (1989) mendefinisikan pembangunan manusia sebagai perluasan kebebasan nyata yang dinikmati oleh manusia, seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan politik. Serupa dengan Sen, Mahbub ul Haq (1995) menjelaskan pembangunan manusia sebagai proses perluasan pilihan yaitu kebebasan berpolitik, partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, pilihan untuk berpendidikan, bertahan hidup dan sehat, serta menikmati standar hidup layak.

Agar dapat terukur dan teramati perkembangan pembangunan manusia, UNDP memperkenalkan konsep Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merepresentasikan sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indeks Pembangunan Manusia mengukur capaian pembangunan manusia melalui berbagai komponen dasar kualitas hidup. IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi yaitu umur panjang dan sehat; pengetahuan dan kehidupan yang layak. Dimensi umur diwakili oleh indikator umur harapan hidup; dimensi pengetahuan dengan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah; serta kehidupan layak diukur melalui indikator pengeluaran perkapita per tahun yang disesuaikan.



Gambar 1. Perkembangan IPM Provinsi Kalimantan Selatan, 2010-2020

Sumber: BPS (gambar diolah)

Pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Selatan secara umum terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan terus meningkatnya nilai Indeks Pembangunan Manusia Kalimantan Selatan. Pada tahun 2020, IPM Kalimantan Selatan telah mencapai 70,91. Jauh meningkat dibandingkan 10 tahun sebelumnya, yang hanya 65,20. Sejak tahun 2018 IPM daerah ini telah termasuk dalam klasifikasi IPM tinggi. Ini merupakan suatu capaian yang cukup menggembirakan dalam kerangka pembangunan manusia.

Meski demikian, pembangunan manusia di Kalimantan Selatan masih harus tetap didorong. Sebab secara relatif, posisi IPM Kalimantan Selatan dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia masih berada pada rangking 22 pada tahun 2019. Di regional Kalimantan sendiri, IPM Kalimantan Selatan hanya lebih baik dari Kalimantan Barat. Sementara itu jika dilihat dari sisi dimensinya, kecuali dimensi ekonomi, dimensi kesehatan dan pendidikan juga berada di bawah nasional. Ini artinya masih diperlukan upaya untuk mendongkrak capaian IPM provinsi ini.

Tantangan pembangunan manusia di Kalimantan Selatan lainnya yang masih perlu mendapat perhatian adalah ketimpangan pembangunan manusia antar kabupaten/kota. Jika dilihat lebih dalam, pembangunan manusia antar kabupaten/kota masih terlihat timpang. Di level administrasi kabupaten/kota, Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Tabalong, Tanah Bumbu dan Tapin telah menyentuh angka di atas 70. Sehingga kelima daerah ini berada pada kelompok dengan IPM tinggi. Sementara kabupaten lain masih berklasifikasi IPM sedang pada rentang 60,00 hingga 69,99. Ketimpangan semakin besar pada saat membandingkan IPM Kota Banjarmasin yang hampir mencapai angka 80, sementara Kabupaten Hulu Sungai Utara tertinggal pada angka IPM 65,49.

Ketimpangan penting untuk dianalisis, agar ada upaya yang dilakukan agar ketimpangan dapat semakin menyempit. Menyempitnya ketimpangan dapat memberikan arti, daerah yang berada pada jajaran bawah telah mengejar ketertinggalan.

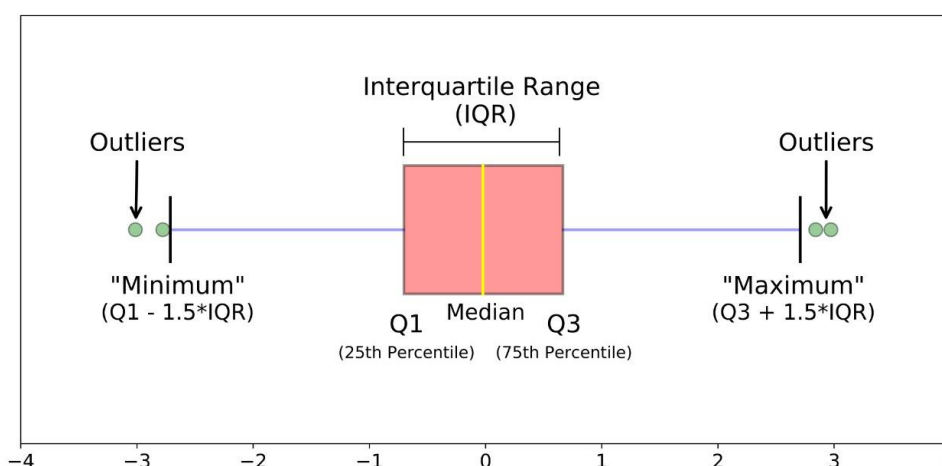
METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menganalisis angka berbagai ukuran ketimpangan IPM beserta komponennya antar kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan dari tahun 2010-2020. Pendekatan analisis yang digunakan adalah analisis secara deskriptif terhadap tabel dan grafik yang diolah. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian *time series*, karena menganalisis data dalam periode tahunan 2010 hingga 2020.

Adapun ruang lingkup sekaligus objek yang dianalisis adalah 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan, yakni Tanah Laut, Kotabaru, Banjar, Barito Kuala, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong, Tanah Bumbu, Balangan, Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru.

Ukuran ketimpangan yang digunakan dalam pembahasan di sini adalah Box and Whisker Plots. Box and Whisker Plots atau lebih sering disebut dengan *Boxplot* atau Box-Plot (kotak-plot) saja. Seperti namanya, *Box and Whisker*, bentuknya terdiri dari *Box* (kotak) dan *whisker*.

Terdapat 5 ukuran statistik yang bisa kita baca dari *boxplot*, yaitu: nilai minimum: nilai observasi terkecil; Q1: kuartil terendah atau kuartil pertama; Q2: median atau nilai pertengahan; Q3: kuartil tertinggi atau kuartil ketiga; nilai maksimum: nilai observasi terbesar. Selain itu, *boxplot* juga dapat menunjukkan ada tidaknya nilai *outlier* dan nilai *ekstrem* dari data pengamatan.



Gambar 2. Boxplot

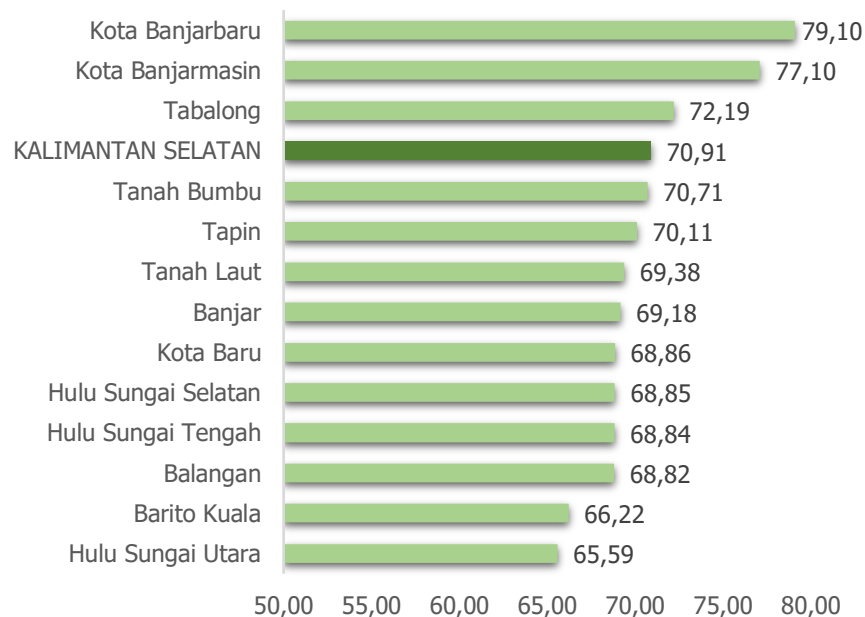
Nilai outlier adalah nilai data yang letaknya lebih dari 1.5 x panjang kotak (IQR), diukur dari UQ (atas kotak) atau LQ (bawah kotak). **Nilai ekstrem** adalah nilai-nilai yang letaknya lebih dari 3 x panjang kotak (IQR), diukur dari UQ (atas kotak) atau LQ (bawah kotak). IQR) sendiri adalah selisih antara Kuartil ketiga (Q3) dengan Kuartil pertama (Q1). Garis bawah kotak (LQ) = Q1 (Kuartil pertama), dan Garis atas kotak (**UQ**) = Q3 (Kuartil ketiga).

Semakin besar nilai IQR, semakin panjang pula kotak. Ini menunjukkan semakin melebar pula kesenjangan antar amatan. Sebaliknya semakin pendek kota, semakin mengecil pula kesenjangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan terbagi ke dalam 13 wilayah daerah otonomi se-tingkat kabupaten/kota. Ada 2 (dua) daerah tersebut yang berstatus kota, yakni Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru. Banjarmasin sendiri merupakan ibukota Provinsi Kalimantan Selatan. Selebihnya ada 11 (sebelas) yang merupakan kabupaten meliputi: Tanah Laut, Kotabaru, Banjar, Barito Kuala, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong, Tanah Bumbu dan Balangan.

IPM kabupaten/kota di Kalimantan Selatan cukup bervariasi dari 65,59 di Kabupaten Hulu Sungai Utara hingga 79,10 pada Kota Banjarbaru. Ada tiga kabupaten yang capaian IPM-nya di atas IPM Provinsi Kalimantan Selatan, yakni Kota Banjarbaru, Kota Banjarmasin dan Kabupaten Tabalong. Sedangkan sisanya 10 kabupaten berada di bawah IPM Provinsi Kalimantan Selatan. Kondisi ini cukup menarik, jumlah kabupaten/kota yang berada di bawah angka Provinsi Kalimantan Selatan jauh lebih banyak dibandingkan di atas provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini bisa terjadi karena 3 kabupaten/kota mempunyai tarikan yang cukup besar sehingga mengimbangi 10 kabupaten lainnya. Ini juga menjadi pertanda adanya kesejangan yang terjadi di Kalimantan Selatan.



Gambar 3. IPM Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Selatan pada tahun 2020
Sumber: BPS (grafik diolah)

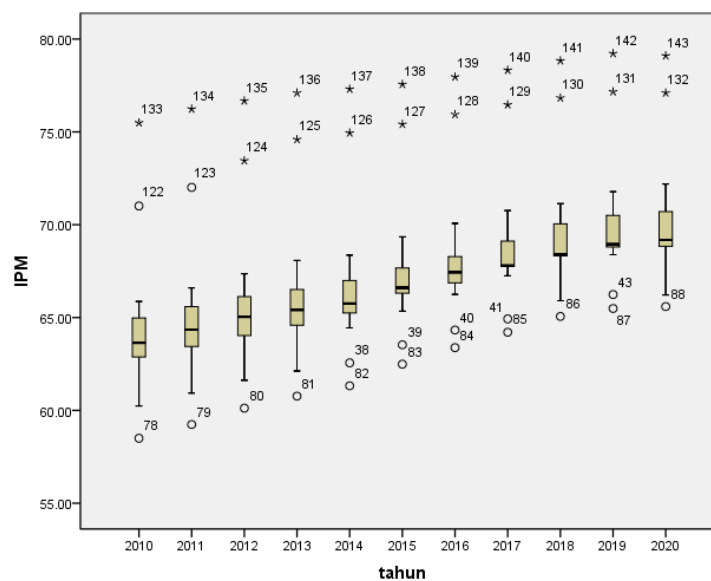
Hal lainnya dapat dilihat, bahwa Banjarbaru dan Banjarmasin sebagai kota dengan capaian tertinggi pertama dan kedua, cukup jauh meninggalkan Kabupaten Tabalong yang berada pada urutan ketiga. Ini menunjukkan ada *gap* yang cukup lebar dalam hal capaian pembangunan manusia. Situasi ini bisa disebabkan karena Banjarmasin dan Banjarbaru yang berstatus kota, sementara Tabalong dan lainnya adalah kabupaten. Beberapa perbedaan mendasar antara kota dan kabupaten adalah terletak pada perbedaan kelengkapan fasilitas pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Fasilitas yang lengkap memberikan peluang bagi peningkatan capaian pembangunan manusia yang tinggal di dalamnya. Berbeda dari sisi kabupaten, yang tidak selengkap di kota. Bahkan rentang kendali juga lebih jauh dan berat, karena luas kabupaten di Kalimantan Selatan jauh lebih besar dibandingkan kota.

Dari sisi klasifikasinya, IPM yang bernilai 70 ke atas ada lima (lima) daerah, yakni Banjarmasin, Banjarbaru, Tabalong, Tanah Bumbu dan Tapin. Kelima daerah tersebut termasuk sebagai daerah dengan IPM tinggi. Sedangkan sisanya masuk dalam IPM kategori sedang, dengan nilai antara 60 sampai dengan 69. IPM Kalimantan Selatan sendiri sudah masuk dalam kategori tinggi sejak tahun

tahun 2018. Kelima daerah yang termasuk IPM tinggi cukup kuat menjadikan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai provinsi dengan IPM tinggi.

Kota Banjarbaru merupakan daerah paling maju pembangunan manusianya. IPM kota ini sudah berada pada angka 79,22. Bahkan lebih tinggi dibandingkan Kota Banjarmasin, yang merupakan ibukota Kalimantan Selatan pada urutan tertinggi kedua. Banjarbaru unggul pada pembangunan dimensi kesehatan dan pendidikan. Sementara Banjarmasin lebih tinggi dari sisi pengeluaran per kapita penduduknya.

Pada sisi sebaliknya, IPM yang relatif rendah dipegang oleh Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Barito Kuala. Kedua daerah tersebut mempunyai kesamaan dalam hal kondisi geografis lahan, yang lebih banyak ditutupi oleh daratan berair atau lahan gambut dan rawa. Kondisi alam tersebut dapat diduga menjadi penghambat lambannya pembangunan di kedua daerah tersebut. Adam Smith (1976) menyatakan adanya korelasi di antara faktor geografis terhadap pertumbuhan. Keadaan geografis yang berbeda menentukan struktur pekerja yang turut membentuk struktur ekonomi suatu wilayah dan menentukan besarnya pengeluaran per kapita penduduknya, termasuk di dalamnya adalah kenaikan biaya transportasi. Sedangkan salah satu indikator penyusun IPM adalah pengeluaran per kapita, terbukti dengan pengeluaran per kapita dari kedua kabupaten tersebut yang merupakan dua terbawah di antara kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Selatan.



Gambar 4. *Boxplot* IPM Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Selatan tahun 2010-2020
Sumber: BPS (diolah)

Boxplot menunjukkan IPM pada semua kabupaten/kota di Kalimantan Selatan terus meningkat dari tahun 2010 hingga 2020. Rentang antar kuartil pertama dan ketiga semakin mengecil hingga tahun 2015. Ini menunjukkan keragaman IPM antar kabupaten/kota juga mengecil. Namun setelah tahun 2015 mulai membesar. Grafik tersebut juga memperlihatkan adanya *outlier* dan nilai ekstrem baik di atas maupun di bawah.

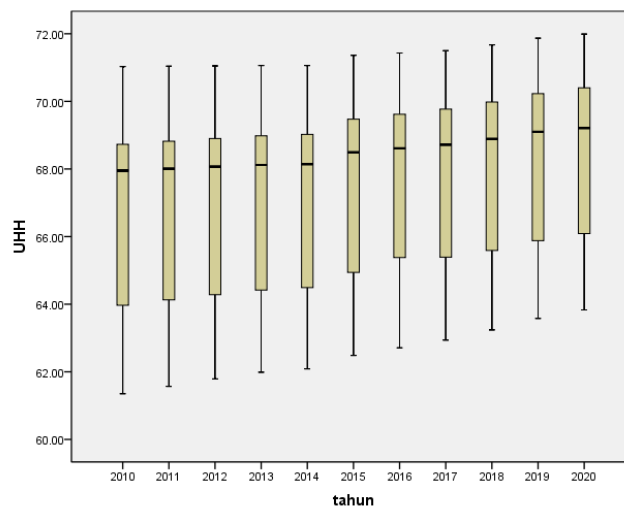
Nilai IPM Banjarmasin dan Banjarbaru yang berstatus *outlier* sebelumnya, berubah menjadi ekstrem sejak tahun 2011. Dengan demikian terjadi perbedaan yang cukup mencolok IPM pada kedua kota ini terhadap kabupaten yang lainnya. Pada bagian atas *outlier* tersebut adalah IPM Banjarmasin dan IPM Banjarbaru. Bahkan IPM Banjarbaru sudah berkategori *outlier* ekstrem sepanjang periode 2010-2020. Sedangkan Banjarmasin baru menjadi *outlier* ekstrem sejak 2012. Sementara *outlier* bawah adalah pada Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Barito Kuala.

Adanya *outlier* semakin memperkuat kesenjangan IPM kabupaten/kota yang terjadi di Kalimantan Selatan. Adanya *outlier* semakin mempertegas ada pencilan dalam pembangunan manusia. Tentunya *outlier* bawah yang perlu mendapatkan perhatian. Karena *outlier* bawah tersebut menunjukkan daerah tersebut masih tertinggal dibanding kabupaten/kota lainnya. Dari sisi sebaran,

garis median pada kotak plot cenderung terkumpul pada bagian bawah yang berarti sebagian besar kabupaten berada di bawah median. Kondisi ini juga memperjelas kenapa hanya ada 3 kabupaten/kota yang berada di atas angka IPM provinsi, sementara di bawah provinsi jauh lebih banyak jumlahnya, yaitu 10 kabupaten lainnya.

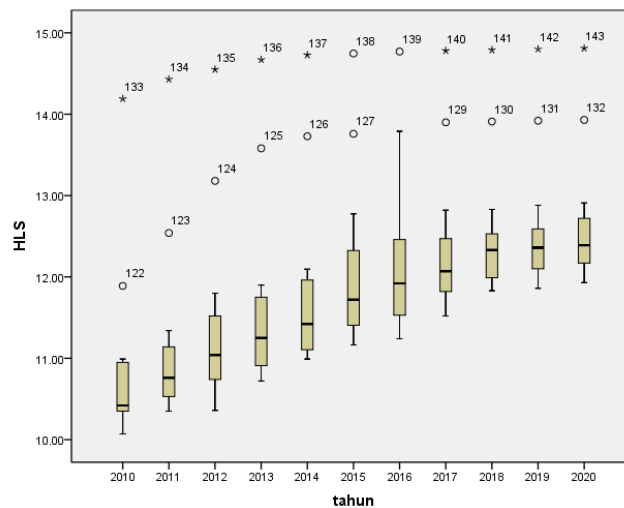
Umur Harapan Hidup

Boxplot dan whisker pada umur harapan hidup menunjukkan kondisi paling ideal. Hal ini disebabkan tidak adanya *outlier*. Semua UHH kabupaten/kota di Kalimantan Selatan berada dalam cakupan yang ideal. Rentang antar kuartil dari tahun ke tahun hingga 2020 juga menunjukkan kecenderungan menyempit. Ini artinya kesenjangan umur harapan hidup antar kabupaten/kota di Kalimantan Selatan semakin menyempit. Garis median lebih tertarik ke atas. Ini menginformasikan sebaran jumlah kabupaten kota lebih banyak yang berada di atas angka umur harapan hidup provinsi dibandingkan yang berada di bawah.



Gambar 5. *Boxplot* Umur Harapan Hidup Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Selatan tahun 2010-2020
Sumber: BPS (diolah)

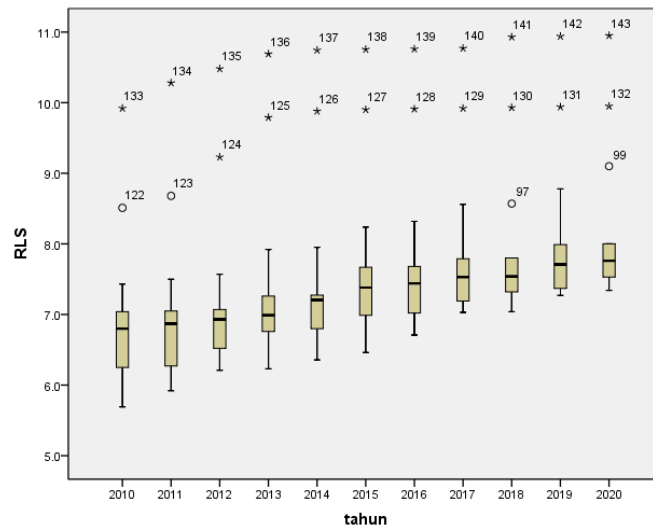
Harapan Lama Sekolah



Gambar 6. *Boxplot* Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Selatan tahun 2010-2020
Sumber: BPS (diolah)

Pada harapan lama sekolah, terdapat 2 kota yang berada di luar *range* batas atas dan batas bawah. harapan lama sekolah Banjarmasin berstatus *outlier* atas, sedangkan harapan lama sekolah Banjarbaru berstatus ekstrem atas, kecuali di tahun 2015 dan 2016. Kondisi ini relatif stabil sepanjang periode 2010-2020. Tahun 2016 sempat tidak ada yang bernilai ekstrem. Sedangkan *outlier* ataupun ekstrem pada bagian bawah tidak ada. Selain itu, pada harapan lama sekolah, median harapan lama sekolah kabupaten/kota di Kalimantan Selatan, cenderung berada di bawah hingga tahun 2017.

Rata-Rata Lama Sekolah



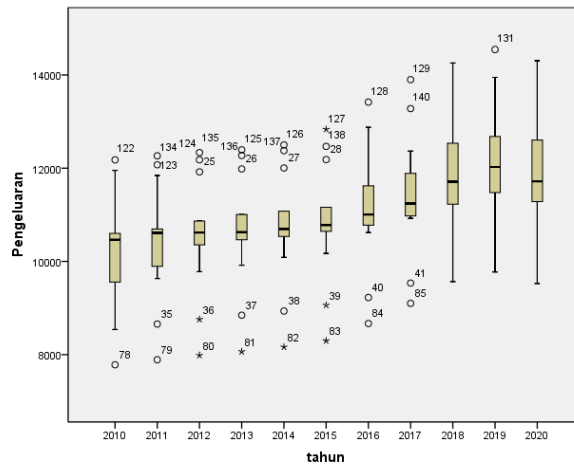
Gambar 7. *Boxplot* Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Selatan tahun 2010-2020
Sumber: BPS (diolah)

Rata-rata lama sekolah juga memiliki pola yang hampir mirip dengan harapan lama sekolah. Banjarmasin dan Banjarbaru berada di luar *range* batas bawah dan batas atas. Bahkan secara umum berada ekstrem atas, kecuali di tahun 2010, 2011 dan 2018, Banjarmasin bernilai sebagai *outlier*. Unikny, di tahun 2020, Kabupaten Tabalong bertransformasi sebagai nilai *outlier*. Hal ini tidak lepas dari capaian rata-rata lama sekolah kabupaten ini yang mulai meninggalkan kabupaten di bawahnya. Tahun 2020, rata-rata lama sekolah Kabupaten Tabalong sudah mencapai 9,10 tahun. Sedangkan kabupaten di bawahnya, Tanah Bumbu baru mencapai 7,96 tahun.

Pengeluaran per Kapita

Pengeluaran per kapita disesuaikan adalah indikator pada IPM yang sangat *volatile*. Perubahan dan dinamika yang terjadi sangat cepat terjadi. Ini dimungkinkan karena variabel pengeluaran yang memang memiliki sifat cepat berubah setiap tahunnya disebabkan oleh pengaruh kondisi ekonomi rumah tangga masyarakat dan situasi makro perekonomian pada berbagai lingkup.

Jika sebelumnya nilai *outlier* maupun ekstrem hanya pada Banjarbaru dan Banjarmasin, maka di pengeluaran per kapita, jauh lebih banyak. Pada bagian atas, terdapat Banjarmasin, Banjarbaru, dan kabupaten yang menjadi *outlier* atas. Ekstrem atas hanya terjadi pada tahun 2015, yaitu Kota Banjarmasin. Sedangkan di bagian bawah ada Kabupaten Barito Kuala dan Hulu Sungai Utara.



Gambar 8. *Boxplot* Pengeluaran per Kapita Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Selatan tahun 2010-2020
 Sumber: BPS (diolah)

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Temuan penting penelitian ini adalah adanya kesenjangan pembangunan manusia yang cukup lebar antar kabupaten/kota. Kota Banjarmasin dan Banjarbaru memiliki capaian pembangunan manusia yang jauh meninggalkan kabupaten lain di Kalimantan Selatan. Analisis sebaran dengan menggunakan *boxplot* membuktikan hal tersebut. Berdasarkan hasil amatan, IPM Kota Banjarbaru dan Banjarmasin berada pada posisi ekstrem di atas, sedangkan IPM Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Barito Kuala berada pada posisi sebaliknya, yaitu ekstrem bawah.

Sementara, dilihat berdasarkan komponen penyebabnya, terlihat pola *boxplot* yang hampir mirip. Pada harapan lama sekolah, meskipun tidak ada kabupaten/kota yang berada pada posisi ekstrem bawah, Banjarmasin dan Banjarbaru masih berposisi ekstrem dan *outlier* atas. Pengeluaran per kapita juga masih dipegang Banjarbaru dan Banjarmasin. Hanya umur harapan hidup yang tidak ada *outlier* dan ekstrem baik atas maupun bawah. Umur harapan cenderung tidak mempunyai kesenjangan yang mencolok. Bahkan kesenjangan cenderung menyempit dari tahun 2010 hingga 2020.

Dengan memperhatikan temuan ini, maka diperlukan upaya-upaya terutama pada kabupaten yang berada pada jajaran bawah untuk mengejar ketertinggalan pembangunan manusia. Semakin menyempitnya kesenjangan ditunjukkan dengan semakin mengecilnya *whisker* pada analisis box plot. Box plot pada dasarnya sudah menunjukkan trek yang tepat. Program pembangunan yang tengah berjalan harus tetap berlanjut, bahkan jika perlu, pemangku kebijakan di kabupaten dapat melakukan serangkaian program akselerasi dengan berpedoman pada perkembangan masing-masing indikator pembentuk IPM sehingga dapat ditentukan skala prioritas sehingga kesenjangan antar kabupaten/kota di Kalimantan Selatan dapat dipersempit.

Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Barito Kuala tentunya akan menjadi prioritas pembangunan manusia. Tantangan pada kedua kabupaten ini memang banyak dipandang ahli cukup besar. Hal tersebut disebabkan oleh karakteristik kedua wilayah yang memiliki wilayah air yang luas yang menjadikan wilayah ini terkendala, khususnya pada peningkatan infrastruktur kewilayahan.

Wilayah lain seperti Kabupaten Banjar, dengan karakteristik pendidikan nonformalnya juga perlu mendapat perhatian. Ke depannya, peningkatan status satuan pendidikan seperti pesantren dapat ditetapkan sebagai institusi pendidikan formal dengan memadukan kurikulum pesantren dengan kurikulum formal dan dapat menjadi bagian dari agenda pembangunan.

Begitu pula dengan kabupaten-kabupaten lainnya seperti Kabupaten Balangan, Kotabaru, Tanah Laut, dan Hulu Sungai Selatan peningkatan pembangunan manusianya tetap perlu diupayakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2020. Indeks Pembangunan Manusia 2019. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Gallup, J.L., Jeffrey D. Sachs, and Andrew D. M. 1999. Geography and Economic Development, *International Region Science Review* 22, 2: 179-232. <https://doi.org/10.1177/016001799761012334>
- Haq, Mahbub ul. 1995. *Reflections on Human Development*. New York: Oxford University Press
- Sen, Amartya. 1989. "Development as Capabilities Expansion." *Journal of Development Planning* 19: 41 – 58
- Smith, Adam. 1976. *An Inquiry into The Nature and Causes of The Wealth of Nations*. 2 vols. Edited by Edwin Canaan. Chicago: University of Chicago Press.
- United Nations Development Programme. 1990. *Human Development Report 1990*. New York: UNDP.